

BUKU AJAR



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Buku Ajar
Hukum Perlindungan Konsumen

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.



Buku Ajar
Hukum Perlindungan Konsumen

Penulis: Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Diterbitkan melalui:

Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY

Email: publikaglobalmedia@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-623-88602-1-0

Ukuran: xii + 242 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: July 2022

Penyunting: M. Tajuddin

Strukturasi isi: T. Rudyanto

Penyelarasa bahasa: J.H Kusuma & Ivan Prijadi

Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen berhasil diselesaikan. Buku Ajar ini dimaksudkan sebagai buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran, baik untuk mahasiswa maupun bagi dosen dan tutor, sehingga diharapkan pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditentukan di dalam buku ajar.

Substansi buku ajar ini meliputi deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan bahan bacaan. Selain itu terdapat pula kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan berdasarkan pada jadwal kegiatan pembelajaran. Buku ini merupakan upaya kami untuk menyajikan pemahaman komprehensif tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan isu-isu terkini dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi ini, pemahaman akan hak dan kewajiban konsumen, serta peran serta pelaku usaha dalam menjaga hak-hak konsumen menjadi semakin penting.

Hukum perlindungan konsumen bukan hanya sebatas kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan produsen atau penyedia jasa. Lebih dari itu, ini adalah bagian integral dari sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai mendasar seperti keadilan, kejujuran, dan kesetaraan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum ini adalah hal yang sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha.

Buku ini dirancang dengan harapan agar menjadi panduan yang bermanfaat dalam menjelajahi ranah yang luas dan beragam dari hukum

perlindungan konsumen. Buku ini mencakup topik-topik mulai dari hak dan kewajiban konsumen, perjanjian baku, tanggung jawab hukum pelaku usaha, hingga penyelesaian sengketa konsumen. Kami juga menyoroti perkembangan terkini dalam hukum perlindungan konsumen dan perbandingannya dengan negara-negara lain.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, terutama kepada rekan-rekan pengajar dan peneliti di bidang hukum perlindungan konsumen. Semangat kolaborasi dan semangat berbagi pengetahuan yang telah kita bangun bersama-sama adalah bagian berharga yang memungkinkan terciptanya buku ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan bermanfaat tentang hukum perlindungan konsumen kepada semua pembaca. Semoga buku ini menjadi panduan yang berguna dalam mengeksplorasi dunia yang menarik dari hukum perlindungan konsumen. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan pada buku ajar ini. Semoga bermanfaat terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan mencapai hasil sesuai dengan kompetensi yang direncanakan.

Jakarta, July 2022

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Tinjauan Umum Mata Kuliah	1
1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah	1
2. Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	2
3. Materi Pembelajaran	4
4. Bahan Bacaan Umum	5
BAB I <i>Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen dan Batasan Hukumnya</i>	9
1. Pendahuluan	9
1.1. Deskripsi Singkat	9
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	10
2.1. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen	10
2.2. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen	15
3. Penutup	17
3.1. Rangkuman	17
3.2. Latihan Soal	18
3.3. Istilah Kunci	19
3.4. Daftar Pustaka	20
BAB 2 <i>Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dan Peraturan yang Terkait</i>	23
1. Pendahuluan	23
1.1. Deskripsi Singkat	23
2. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen	24
2.1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	26
2.2. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata	30
2.3. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Publik	31
3. Penutup	31
3.1. Rangkuman	31
3.2. Latihan Soal	32

3.3. Istilah Kunci	32
3.4. Daftar Pustaka	33
BAB 3 Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	35
1. Pendahuluan	35
1.1. Deskripsi Singkat	35
2. Konsumen	35
2.1. Pengertian Konsumen	35
2.2. Kepentingan Konsumen	37
2.3. Hak dan Kewajiban Konsumen	38
3. Pengelola (Pelaku) Usaha	40
3.1. Pengertian Pelaku Usaha	40
3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	41
4. Penutup	42
4.1. Rangkuman	42
4.2. Latihan Soal	43
4.3. Istilah Kunci	44
4.4. Daftar Pustaka	45
BAB 4 Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia	47
1. Pendahuluan	47
1.1. Deskripsi Singkat	47
2. Perkembangan Perlindungan Konsumen di Indonesia	48
2.1. Lemahnya kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha	50
2.2. Industrialisasi dan kemajuan teknologi	52
2.3. Globalisasi dan perdagangan bebas	53
3. Penutup	54
3.1. Rangkuman	54
3.2. Latihan Soal	54
3.3. Istilah Kunci	55
3.4. Daftar Pustaka	56
BAB 5 Berbagai Larangan Bagi Pelaku Usaha	57
1. Pendahuluan	57
1.1. Deskripsi Singkat	57
2. Larangan-larangan dalam Praktik Bisnis	58
2.1. Larangan mengenai kelayakan produk	60
2.2. Larangan pemberian informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan menyesatkan	61
3. Penutup	62

3.1. Rangkuman	62
3.2. Latihan Soal	63
3.3. Istilah Kunci	63
3.4. Daftar Pustaka	65
BAB 6 <i>Perjanjian Baku/Eksonerasi</i>	67
1. Pendahuluan	67
1.1. Deskripsi Singkat	67
2. Gambaran Umum tentang Perjanjian, Perjanjian Baku, dan Klausula Baku	68
2.1. Pengertian Perjanjian	68
2.2. Hakikat Perjanjian Baku	71
3. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perjanjian Baku	73
3.1. Undang-Undang	74
3.2. Peraturan Pemerintah	79
3.3. Peraturan Perundang-undangan lain	82
4. Penutup	85
4.1. Rangkuman	85
4.2. Latihan Soal	86
4.3. Istilah Kunci	87
4.4. Daftar Pustaka	88
BAB 7 <i>Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dan Ganti Rugi kepada Konsumen</i>	91
1. Pendahuluan	91
1.1. Deskripsi Singkat	91
2. Tanggung Jawab Hukum	92
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	92
3.1. Konsumen Harus Membuktikan	95
4. Penutup	98
4.1. Rangkuman	98
4.2. Latihan Soal	99
4.3. Istilah Kunci	100
4.4. Daftar Pustaka	101
BAB 8 <i>Gugatan Class action dalam Perlindungan Konsumen</i>	103
1. Pendahuluan	103
1.1. Deskripsi Singkat	103
2. Pengertian Gugatan <i>Class action</i>	104
3. Syarat dan Prosedur Gugatan Kelompok atau <i>Class action</i>	105
4. Contoh Gugatan Kelompok atau <i>Class action</i>	107
5. Penutup	108

5.1. Rangkuman	108
5.2. Latihan Soal	109
5.3. Istilah Kunci	110
5.4. Daftar Pustaka	110
BAB 9 <i>Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Konsumen</i>	113
1. Pendahuluan	113
1.1. Deskripsi Singkat	113
2. Pengertian Sengketa Konsumen	114
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen	118
4. Penutup	120
4.1. Rangkuman	120
4.2. Latihan Soal	120
4.3. Istilah Kunci	121
4.4. Daftar Pustaka	122
BAB 10 <i>Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Negara Lain</i>	125
1. Pendahuluan	125
1.1. Deskripsi Singkat	125
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia	126
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Negara-Negara Yang Menganut Sistem Hukum Common Law	128
4. Pembelajaran dari Studi Perbandingan	136
5. Penutup	140
5.1. Rangkuman	140
5.2. Latihan Soal	141
5.3. Istilah Kunci	141
5.4. Daftar Pustaka	142
BAB 11 <i>Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kedaluwarsa</i>	145
1. Pendahuluan	145
1.1. Deskripsi Singkat	145
2. Hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penyebaran produk makanan dan minuman yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa	146
3. BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi produk makanan dan minuman yang telah melewati masa kedaluwarsa	148
4. Tindakan yang Perlu Diambil dalam Menangani Produk atau Barang yang telah Kedaluwarsa	150
5. Penutup	153
5.1. Rangkuman	153
5.2. Latihan Soal	154

5.3. Istilah Kunci	155
5.4. Daftar Pustaka	156
BAB 12 Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen	159
1. Pendahuluan	159
1.1. Deskripsi Singkat	159
2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen	160
2.1. Sanksi Administratif	160
2.2. Sanksi Pidana Pokok	161
2.3. Sanksi Pidana Tambahan	162
3. Penutup	163
3.1. Rangkuman	163
3.2. Latihan Soal	164
3.3. Istilah Kunci	164
3.4. Daftar Pustaka	166
BAB 13 Korporasi dan Perlindungan Konsumen	167
1. Pendahuluan	167
1.1. Deskripsi Singkat	167
2. Korporasi	168
2.1. Pengertian Korporasi	168
3. Perlindungan Konsumen	174
3.1. Penguatan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen	175
3.2. Kepastian dan Jaminan Keseimbangan Kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha	178
3. Penutup	187
3.1. Rangkuman	187
3.2. Latihan Soal	188
3.3. Istilah Kunci	188
3.4. Daftar Pustaka	189
BAB 14 Product Liability dan Tanggung Jawab Pidana	191
1. Pendahuluan	191
1.1. Deskripsi Singkat	191
2. Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>) oleh Pelaku Usaha	192
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	196
3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	196
3.2. Kriteria Perbuatan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	200

3.3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	202
3.4. Tahapan Pengakuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	205
4. Penutup	209
4.1. Rangkuman	209
4.2. Latihan Soal	209
4.3. Istilah Kunci	210
4.4. Daftar Pustaka	211
BAB 15 Lembaga-Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen	215
1. Pendahuluan	215
1.1. Deskripsi Singkat	215
2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	216
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	219
4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)	222
5. Penutup	225
5.1. Rangkuman	225
5.2. Latihan Soal	225
5.3. Istilah Kunci	226
5.4. Daftar Pustaka	227
BAB 16 Permasalahan dan Kasus-Kasus Sengketa Konsumen	229
1. Pendahuluan	229
1.1. Deskripsi Singkat	229
2. Menangani Permasalahan Sengketa Konsumen	230
3. Contoh Kasus Sengketa Konsumen Di Indonesia	232
3.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Melindungi Konsumen Terhadap Susu Kemasan yang Tercemar	233
3.2. Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh BPSK antara Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Sengketa Susu Kemasan yang Tercemar	233
4. Penutup	234
4.1. Rangkuman	234
4.2. Latihan Soal	235
4.3. Istilah Kunci	236
4.4. Daftar Pustaka	237
Daftar Indeks	239

Tinjauan Umum Mata Kuliah

1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen pada Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia memiliki bobot 2 (Dua) sks. Mata kuliah ini bertujuan, agar mahasiswa menafsirkan aspek teoritis dan aspek normatif dalam hukum perlindungan konsumen, serta mampu mengambil keputusan dalam masalah pengembangan ilmu serta penyelesaian masalah yang konkret terkait perlindungan konsumen.

Mata kuliah ini membahas tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang di dalamnya membahas, tentang Hak dan kewajiban Konsumen Dan Pelaku usaha, Hal – hal yang dilarang dalam perlindungan konsumen, Sejarah dan Perkembangan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Tanggung Jawab atas produk pangan yang di perdagangkan oleh pelaku usaha, Dibahas Penyelesaian sengketa konsumen antara Konsumen dan pelaku usaha, Gugatan *Class action* Kepada pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang di bentuk oleh Pemerintah, Perjanjian Baku/Eksonerasi yang dilarang UUPK, Perbandingan Hukum Indonesia dengan Negara luar yang memiliki sistem hukum berbeda, Sanksi – sanksi hukum terhadap pelanggaran UUPK, Pelanggaran Korporasi dan perlindungan konsumen, *Product Liability* dan tanggung jawab pidana, Kasus – kasus pengaduan konsumen, dan metode pembelajaran di Kelas.

Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan *student center learning*, dengan metode pembelajaran diskusi kelompok dan studi

kasus, dalam bentuk pembelajaran kuliah secara daring (*online*). Dengan demikian mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri, serta mampu mengelola sikap kritis konstruktif.

2. Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Secara prinsip pemahaman Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia memiliki beberapa Capaian Pembelajaran (CP) sebagai berikut:

Sikap

- S8 Taat hukum dan disiplin kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- S9 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Ketrampilan Umum

- KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.

KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.

Ketrampilan Khusus

KK4 Mampu merancang berbagai peraturan dan membuat dokumen *legal corporate*.

Pengetahuan

P1 Mampu menganalisis konsep dan teori tentang hukum tata negara, hukum bisnis, dan hukum pidana.

P3 Mampu menganalisis dan mengembangkan teori badan hukum, perpajakan, kredit, bank, jaminan hutang, dll.

P8 Mampu menganalisis konvensi – konvensi internasional dan organisasi internasional di bidang *property right*.

Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia juga memiliki beberapa Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah pernyataan kinerja yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen sebagai hasil dari proses pembelajaran. CPMK ini mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Adapun beberapa CPMK di Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia adalah sebagai berikut:

S5, S9 Mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup, serta pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen.

KK6, P5, P6, P8, S5, S8 Mampu menganalisis Peraturan perundang-undangan Perlindungan Konsumen dalam Harmonisasi Hukum.

KK1, KK2, KK4, KK6, P1, P3, PP5, P8 Mampu menganalisis, sanksi hukuman terhadap pelanggaran UUPK.

KU1, KU2, KU4, KU6, KU8 Mampu mengonsep gugatan penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

3. Materi Pembelajaran

Di dalam buku ajar Mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, akan membahas sejumlah materi yang mencakup berbagai aspek hukum perlindungan konsumen, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga permasalahan dan kasus-kasus sengketa konsumen. Dengan memahami materi – materi yang ada dalam buku ajar ini, diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang kokoh untuk menavigasi dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan atau kasus-kasus konsumen yang terjadi dalam masyarakat. Materi pembelajaran yang akan dibahas meliputi:

BAB 1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen dan Batasan Hukumnya

BAB 2 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Yang Terkait

BAB 3 Hak Dan Kewajiban Konsumen, Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

BAB 4 Sejarah Perlindungan Konsumen Di Indonesia

BAB 5 Berbagai Larangan Bagi Pelaku Usaha

BAB 6 Perjanjian Baku/ Eksonerasi

- BAB 7 Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha Dan Ganti Rugi Kepada Konsumen
- BAB 8 Gugatan *Class action* Dalam Perlindungan Konsumen
- BAB 9 Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Konsumen
- BAB 10 Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Negara Lain
- BAB 11 Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kedaluwarsa
- BAB 12 Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang – Undang Perlindungan konsumen
- BAB 13 Korporasi Dan Perlindungan konsumen
- BAB 14 *Product Liability* Dan Tanggung Jawab Pidana
- BAB 15 Lembaga – Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen
- BAB 16 Permasalahan Dan Kasus – Kasus Sengketa Konsumen

4. Bahan Bacaan Umum

Dalam membantu mendalami dan memperluas pemahaman tentang Hukum Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa bahan bacaan yang direkomendasikan dan relevan dengan topik pembahasan buku ajar ini. Bahan bacaan ini adalah sumber-sumber yang telah dipilih secara khusus untuk memberikan pemahaman yang kokoh tentang dasar hukum perlindungan konsumen dan hak dan kewajiban konsumen. Dalam bahan bacaan ini, terdapat referensi yang mencakup literatur dasar yang sangat berguna untuk membangun dasar pengetahuan yang solid. Beberapa bahan bacaan yang telah dipilih dan dianggap relevan dengan konteks hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

Bahan Bacaan Utama

1. Carmelo V. Sison, *Primer On Consumer Protection Law*, (Philippines, C & E Publishing Inc, 2007)

2. Direktorat Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, *Perberdayaan Hak – hak Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan, 2001)
3. Ahmadi Miru, *Prinsip- prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*,(Jakarta: radjawali Press, 2011)
4. Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
5. Erman Rajagukguk, Nurmarjito, Sri Rejeki Hartono, Saefullah, Tini Hadad, Toto Tohir, romli Atmasasmita, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000)
6. Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
7. Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan tanggung Jawab Mutlak*,(Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum, 2004)
8. Zumrotin K Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Swara, 1996)
9. Yusuf Sofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2003)
10. Adi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Jakrta: Studia Press, 2002)
11. Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2002)
12. AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,(Jakarta: Diadit Media, 2001)
13. John Pieries, Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007)

Bahan Bacaan Pendukung

1. Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
2. Gunawan Wijaya, Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
3. N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005)
4. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006)
5. Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
6. Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999)

Daftar Indeks

A

Arbitrase · 131, 136, 138, 140,
202, 210, 259
Asas · 5, 26, 27, 28, 31, 32, 40,
203, 219, 220, 225, 233, 234
Asas keseimbangan · 28, 203
Asas manfaat · 27

B

Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) · 26, 32,
41, 129, 133, 136, 137, 138,
139, 181, 182, 183, 251, 254,
258, 259, 260
Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) · 40, 236,
237, 240, 243, 247, 248
Bisnis · 6, 72, 78, 152, 159, 161,
219, 233
BPKN · 9, 40, 150, 160, 237,
238, 239, 243, 247, 248, 249

BPOM · 8, 164, 166, 167, 168,
170, 172, 173
BPSK · 10, 41, 134, 135, 143,
144, 148, 157, 165, 178, 193,
195, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 210, 252, 254,
256, 257

C

Class action · 7, 12, 16, 119,
120, 121, 123, 126

E

E-commerce · 103
Eksonerasi · 6, 12, 15, 81, 102

G

Ganti rugi · 215
*Guidelines for Consumer
Protection* · 67

H

Hak dan kewajiban · 12, 83, 194
Hak dan kewajiban konsumen ·
194
Hak konsumen · 51, 56
Hukum ekonomi · 24, 25
Hukum konsumen · 21, 22, 23,
25
Hukum perlindungan
konsumen · 3, 20, 23, 25, 41,
42, 142

I

International Monetary Fund
(IMF) · 62
International Organization of
Consumer Union (IOCU) · 66

K

Kedaluwarsa · 8, 16, 18, 163,
169
Kepentingan konsumen · 49, 55
Konflik · 130, 133, 138, 140
Konsiliasi · 138
Korporasi · 8, 9, 12, 17, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 208, 209, 210, 218, 220,
221, 222, 223, 225, 226, 227,
232, 233, 234

L

Larangan mengenai kelayakan
produk · 6, 74
Lembaga Pembinaan dan
Perlindungan Konsumen
(LP2K) · 59, 60, 68
Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM) · 9, 41,
236, 240, 247, 248
Lex specialis · 44
Liability · 9, 12, 16, 112, 113,
116, 212, 213, 221, 230, 231,
232
LP2K · 68
LPKSM · 41, 240, 241, 242, 243,
247, 248, 249

M

Mediasi · 131, 138, 140, 259
Mitigasi risiko · 257

O

OJK · 97, 103
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ·
97, 101, 103

P

PBB · 50, 67

Pelaku usaha · 12, 39, 52, 55,
62, 63, 64, 86, 89, 90, 92,
112, 133, 134, 170, 172, 179,
195, 215, 216, 217
Pencabutan izin usaha · 181
Pendidikan konsumen · 50, 245
Pengertian konsumen · 198
Penyelesaian sengketa · 12,
136, 144, 146, 148, 157
Perbuatan melanggar hukum ·
109
Perikatan · 42, 82, 116
Perjanjian · 6, 12, 15, 81, 82, 85,
86, 87, 88, 97, 101, 102, 195
Perjanjian baku · 81, 86, 87, 97,
101, 195
Perlindungan hukum · 21, 38
Perlindungan konsumen · 16,
26, 27, 35, 50, 59, 76, 110,
113, 164, 172, 177, 207, 251,
252, 256
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) · 67
Perusahaan · 206, 208
Prasidang · 259

S

Sanksi · 8, 12, 16, 41, 79, 159,
165, 172, 174, 177, 178, 179,
181, 183
Sanksi administratif · 178, 181
Sanksi pidana pokok · 179, 181

Sanksi pidana tambahan · 181
Sengketa · 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17,
26, 32, 40, 41, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 143, 145, 147,
148, 149, 151, 152, 160, 161,
165, 178, 181, 182, 183, 193,
197, 198, 199, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 236, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 258, 259,
260
Sengketa konsumen · 132, 133,
136, 253

U

UUPK · 12, 15, 21, 22, 27, 29,
30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 51, 62, 67, 68,
86, 89, 91, 92, 93, 96, 100,
101, 102, 108, 110, 111, 112,
114, 115, 135, 143, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 171, 172,
174, 194, 195, 199, 200, 201,
204, 237, 238, 239

W

Wanprestasi · 115, 138
World Trade Organization
(WTO) · 62

Y	61, 67, 68, 236, 239, 243, 244, 246, 247, 249
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) · 9, 59, 60,	YLKI · 60, 68, 239, 240, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

BUKU AJAR

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen ini merupakan upaya kami untuk menyajikan pemahaman komprehensif tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan isu-isu terkini dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi ini, pemahaman akan hak dan kewajiban konsumen, serta peran serta pelaku usaha dalam menjaga hak-hak konsumen menjadi semakin penting.

Hukum perlindungan konsumen bukan hanya sebatas kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan produsen atau penyedia jasa. Lebih dari itu, ini adalah bagian integral dari sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai mendasar seperti keadilan, kejujuran, dan kesetaraan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum ini adalah hal yang sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha.

Buku ini dirancang dengan harapan agar menjadi panduan yang bermanfaat dalam menjelajahi ranah yang luas dan beragam dari hukum perlindungan konsumen. Buku ini mencakup topik-topik mulai dari hak dan kewajiban konsumen, perjanjian baku, tanggung jawab hukum pelaku usaha, hingga penyelesaian sengketa konsumen. Kami juga menyoroti perkembangan terkini dalam hukum perlindungan konsumen dan perbandingannya dengan negara-negara lain.



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

Jln. Diponegoro, Jetis, 55232, Yogyakarta, Indonesia.
E-mail: publikaglobalmedia@gmail.com

ISBN 978-623-88602-1-0

